

Randusari Klaten Juara 1 Desa Pangan Aman



KR-Istimewa

Penyerahan penghargaan Desa Pangan Aman.

KLATEN (KR) - Desa Randusari Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, berhasil menyabet posisi terbaik nasional Lomba Desa Pangan Aman yang digelar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI. Kepala Desa Randusari, Sutarjo, Senin (23/10) mengemukakan, penghargaan tersebut diserahkan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan POM RI, Rita Endang pada Pertemuan Teknis Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman (Germas SAPA) di Auditorium Gedung Merah Putih Badan POM RI, Jakarta, Kamis (19/10).

Sutarjo mengemukakan, Desa Randusari mendapatkan juara I regional barat Lomba Desa Pangan Aman. Dalam kesempatan penyerahan penghargaan tersebut, Rita menyampaikan bahwa keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama dan harus dikawal di setiap lini. Yaitu mulai dari hulu hingga ke hilir, baik di desa, pasar, hingga sekolah. "Untuk mewujudkan keamanan pangan, implementasi keamanan pangan di sepanjang rantai pangan perlu dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan peran aktif masyarakat agar dapat memberikan dampak bagi masyarakat," kata Rita.

Menurutnya Germas SAPA merupakan program yang diinisiasi Badan POM RI untuk mendukung terwujudnya keamanan pangan berbasis masyarakat. Sejumlah program digulirkan dalam Germas SAPA serta melibatkan peran aktif masyarakat, yaitu program desa pangan aman, program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, serta Pangan Jajanan Anak Sekolah Aman.

(Sit)-f

Dilakukan Kajian Calon Sekda Banyumas

BANYUMAS (KR) - Menjelang masa batas usia pensiun Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banyumas, Wahyu Budi Saptono pada Februari 2024 mendatang, Penjabat (PJ) Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro sudah mulai melakukan kajian untuk mengusulkan calon Sekda. "Kami masih melakukan kajian," kata PJ Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro saat dikonfirmasi, Selasa (24/10). Meski begitu ia tidak menjelaskan kajian seperti apa yang sedang dilakukan.

Dikonfirmasi terpisah Kepala Badan Kepegawain Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Banyumas, Eko Prijanto menjelaskan Batas Usia Pensiun (BUP) Sekda Banyumas Wahyu Budi Saptono akan jatuh pada Februari 2024. Untuk mengisi kekosongan Sekda Kabupaten Banyumas Februari 2024, menurut Eko Prijanto banyak pejabat yang sudah memenuhi syarat untuk mengganti atau mengisi kekosongan Sekda pada Februari 2024 mendatang. "Banyak pejabat di Banyumas yang sudah memenuhi syarat seperti dari eselon dan kepangkatan, kita harus cek dulu," jelasnya.

Informasi yang berkembang di lingkungan Pemkab Banyumas sudah muncul beberapa nama pejabat yang sudah memenuhi syarat untuk siap diusulkan untuk menjabat Sekda Februari 2024 mendatang. Nama pejabat tersebut antara lain Agus Nur Hadie yang menjabat sebagai Asisten Umum Administrasi, Nungki Harry Rachmat Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda, Eko Prijanto Kepala BKSPDM, dan Joko Wiyono Kepala Dinas Pendidikan.

(Dri)-f

RELAWAN DUKUNG GANJAR BANYUMAS
Targetkan Raih Kemenangan 80 Persen

BANYUMAS (KR) - Relawan Dukung Ganjar Pranowo Presiden ke-8 (DGP8) Kabupaten Banyumas, optimis akan memenangkan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024. Sebanyak 80 persen dari jumlah pemilih tetap (DPT) yakin bisa diraih.

"Jumlah DPT Kabupaten Banyumas sebanyak 1,3 juta, kami optimis bisa memenangkan sebanyak 80 persen atau 1 juta pemilih," kata Ketua DGP8 Kabupaten Banyumas, Kabulin Undian Sugihartono, Minggu (22/10) seusai acara deklarasi Relawan DGP8 Kabupaten Banyumas, di Desa Tambaksogra, Sumbang, Banyumas. Menurutnya DGP8 Banyumas terus bersemangat dan terus bergerak memenangkan Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024.

"Kami yakin Ganjar Pranowo-Mahfud MD merupakan sosok terbaik yang pantas menjadi Presiden RI selanjutnya dan akan membawa Indonesia semakin maju dan dapat menyejahterakan masyarakat serta menjadikan Indonesia lebih berkeadilan," tegasnya.

Kabul, menjelaskan saat ini DGP8 Kabupaten Banyumas sudah bergerak membentuk koordinator tingkat kecamatan, tingkat desa, bahkan hingga ke tingkat RT. Mantan Bupati Banyumas Achmad Husein yang ikut hadir dalam deklarasi Relawan DGP8, menjelaskan Ganjar Pranowo orang yang cerdas, pemberani, dan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan.

(Dri)-f



KR-Driyanto

Relawan DGP8 Banyumas salurkan bantuan sem-bako.

SEGERA BUKA PPDS DAN S3 ILMU KEDOKTERAN

FK Unissula Ambil Sumpah 26 Dokter Baru

SEMARANG (KR)- Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung (FK Unissula) Semarang menggelar acara sumpah dokter bagi 26 dokter baru, Sabtu (21/10). Dengan disumpahnya 26 dokter baru pada sumpah dokter ke-127 tahun 2023 tersebut FK Unissula sampai saat ini telah meluluskan 6.003 dokter yang tersebar di seluruh Indonesia

Hadir pada acara tersebut di antaranya Dekan Fakultas Kedokteran Unissula Dr dr H Setyo Trisnadi SH SpKF, Wakil Rektor III Unissula Mohammad Qomarruddin ST MSc PhD, Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) Thoha Putra MBA, dan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes Provinsi Jateng Riptieni Tri Lutiarsi SKM MKes.

Dekan FK Unissula Semarang Dr dr H Setyo Trisnadi SH SpKF pada acara sumpah tersebut berpesan agar dokter baru bisa memberi layanan kedokteran yang baik, mempertahankan perilaku dokter yang baik, kesungguhan

dan tuntas dalam bekerja, berintegritas moral, jujur dan intelektual. Juga ilmunya makin berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat.

Setyo Trisnadi menyampaikan rencana FK segera membuka program pendidikan dokter spesialis atau PPDS (Spesialis Penyakit Dalam) tahun 2025 dan program Doktor (S-3) Ilmu Kedokteran dan Kesehatan tahun 2024 sebagai langkah pengembangan FK Unissula sesuai UU no 17 tahun 2023 tentang kesehatan. "Pendirian pendidikan dokter spesialis bisa ditempuh lewat dua cara yaitu berbasis rumah sakit atau berbasis universitas. Unissula memilih cara berbasis universitas. Target kami, awal tahun 2024 sudah mendapatkan pendampingan dari fakultas pembina dan di tahun 2025 sudah berdiri pendidikan dokter spesialis di FK Unissula," ujarnya.

Kabid Sumberdaya Kesehatan Dinkes Jateng Riptieni Tri Lutiarsi SKM MKes menyampaikan dari data yang ada, saat ini 3,98 persen puskesmas di Indonesia

tanpa dokter. Juga 60,98 persen RSUD kabupaten dan kota di Indonesia belum terpenuhi dengan 7 dokter spesialis dasar dan penunjang. Kementerian akan menambah jumlah dokter spesialis dan sub spesialis. Sehingga sebagai peluang bagi lulusan FK un-

tuk mengisi kebutuhan dokter dan dokter spesialis di puskesmas dan rumah sakit di seluruh Indonesia. Kemenkes dan LPDP Kemkeu memberi beasiswa untuk pendidikan dokter spesialis dan sub spesialis dan ini bisa dimanfaatkan para dokter.

(Sgi)-f



KR-Sugeng Irianto

Dekan FK Unissula (kiri) menyerahkan ijazah kepada dokter baru.

KADO ISTIMEWA HARI SANTRI NASIONAL 2023

Disahkan Perda Fasilitasi Pengembangan Pesantren

SALATIGA (KR) - DPRD Salatiga mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah Fasilitasi Pengembangan Pesantren. Pengesahan ini dinilai sebagai kado istimewa Hari Santri Nasional 2023. Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPRD Salatiga dan beberapa pimpinan pondok pesantren bersyukur dengan pengesahan Perda Pengembangan Pesantren di Salatiga tersebut.

"Perda Fasilitasi Pengembangan Pesantren ini nantinya akan membuka akses ke seluruh OPD yang ada di Pemkot Salatiga. Seperti soal kesehatan, infrastruktur dan program pemberdayaan ekonomi di pesantren. Pemkot Salatiga bisa memberi bantuan ke pesantren yang selama ini dinilai pesantren itu di bawah Kemenag. Ini seperti kado di hari santri," tandas Ketua DPC PKB Salatiga, Saiful Mashud kepada KR, Senin (23/10).

Saiful yang juga Wakil Ketua DPRD Salatiga ini juga mengungkapkan dengan disahkannya Perda Fasilitasi Pengembangan Pesantren ini bisa melakukan follow up anggaran pada penetapan APBD tahun 2025. Program Pemkot Salatiga akan bisa masuk ke pesantren termasuk memberikan pelayanan kesehatan para santri dan honor guru (ustadz) bisa dianggarkan melalui APBD Salatiga. "Bisa juga mengalokasikan untuk honor guru

di pesantren. Pada tahun 2024, kami akan mulai melangkah ke arah sana," ungkap Saiful.

Ketua Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) Nahdlatul Ulama (NU) Salatiga, Gus Nasif Ubaddah mengungkapkan selama ini yang diketahui merupakan satu pintu melalui Kemenag saja. Pembinaan tetap oleh Kemenag Salatiga. Menurutnya jumlah pesantren di Salatiga hingga 2023 ini, sebanyak 41 pesantren dengan jumlah santri kurang lebih mencapai 4.000 orang. "Kami berharap dengan Perda Fasilitasi Pengembangan akan membuka luas pengembangan pendidikan pesantren di Salatiga ini. Seperti peningkatan perekonomian dan pemberdayaan," kata Gus Nasif Ubaddah.

Ketua RMI NU Salatiga ini berharap agar secepatnya Perda Fasilitasi Pengembangan Pesantren

ditindaklanjuti oleh Pj Walikota Salatiga untuk segera menerbitkan dengan Peraturan Walikota (Perwali) agar bisa lebih efektif dan bermanfaat besar bagi pesantren. "Semoga bisa cepat disusun dengan Perwali," katanya.

Sementara anggota DPRD Salatiga dari PKB, M Miftah mengungkapkan bahwa usulan ini mengalir dari RMI Salatiga dan dikawal oleh fraksi PKB dan akhirnya bisa diperdakan. "Alhamdulillah bisa disahkan agar ke depan bisa memberikan manfaat dan dakwah pesantren semakin maju," kata M Miftah. Pengesahan Raperda Fasilitasi Pengembangan Pesantren ini digelar dalam rapat paripurna DPRD Salatiga, Senin (23/10). Pengesahan ini ditandatangani Ketua DPRD Salatiga, Dance Ishak Palit dan Pj Walikota Salatiga, Sinoeng N Rachmadi.

(Sus)-f

THE 8TH INTERNATIONAL EXPERT MEETING ON BOROBUDUR

Kegiatan 5 Tahunan Diikuti Beberapa Ahli Pelestari

MAGELANG (KR) - Beberapa ahli pelestari dari beberapa negara bertemu di forum 'The 8th International Expert Meeting on Borobudur' di Grand Artos Hotel & Convention Magelang. Acara dibuka Direktur Perlindungan Kebudayaan Ditjen Kebudayaan Kemdikbud Ristek Judi Wahjudin SS MHum, Senin (23/10) dan Selasa (24/10) siang para peserta mengikuti beberapa rangkaian kegiatan.

International Expert Meeting on Borobudur tahun 2023 merupakan penyelenggaraan pertemuan 5 tahunan para ahli pelestari Borobudur yang ke-8. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sebuah ajang diskusi dan kolaborasi antara para pakar terkemuka di bidangnya, tetapi juga meru-

pakan bentuk komitmen bersama untuk menjaga, melestarikan dan sekaligus mempromosikan kekayaan budaya, sejarah dan nilai penting Candi Borobudur yang luar biasa.

Saat membuka kegiatan, Judi Wahjudin mengatakan pertemuan ini merupakan pertemuan yang penting karena paradigma disiplin ilmu berubah terus, kemudian aturan-aturan juga berubah terus dan perubahan alam juga luar biasa. Ini semua harus disepakati, harus ada komitmen bersama agar kelestariannya, dalam artian perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaannya tetap berlanjut.

Dalam kesempatan ini juga disampaikan 3 hal dari Dirjen Kebudayaan, diantaranya berkaitan

dengan pentingnya pendekatan lintas disiplin dalam pelestarian. Keanekaragaman tantangan yang dihadapi dalam upaya pelestarian Candi Borobudur membutuhkan pendekatan multidimensional. Oleh karena itu penelitian lintas disiplin ilmu menjadi sangat krusial. Bukan hanya arkeolog, tetapi juga ahli lingkungan, insinyur struktural, pakar konservasi, sosial budaya dan banyak disiplin ilmu lain, harus bekerja sama menggali wawasan dari berbagai perspektif untuk solusi menyeluruh.

Sinergi antardisiplin ilmu bisa mewujudkan strategi konservasi yang lebih holistik, mencakup aspek fisik, bangunan, dampak lingkungan, dinamika sosial dan faktor lainnya. Misalnya teknologi

modern dari ilmu rekayasa bisa dipadukan dengan metode tradisional dan wawasan ekologis untuk menghasilkan solusi konservasi yang inovatif dan berkelanjutan.

Sub Koordinator Warisan Dunia Borobudur Museum dan Cagar Budaya (MCB) Wiwit Kasiyati diantaranya mengatakan Candi Borobudur telah mengalami dua kali pemugaran besar. Pemugaran yang pertama dilakukan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, di bawah pimpinan Theodore van Erp pada tahun 1907-1911. Pemugaran yang kedua pada tahun 1973-1983 dilaksanakan Pemerintah Indonesia dibantu UNESCO dan negara-negara donor dalam koridor kerjasama internasional.

(Tha)-f

JPPR dan KIPP Tolak Dinasti Politik di Indonesia

TEMANGGUNG (KR) - Jaringan Pendidik Pemilih untuk Rakyat (JPPR) dan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menolak segala bentuk tindakan baik secara politik maupun hukum yang dapat melegitimasi dan berpihak pada terbentuknya dinasti politik di Indonesia.

Manajer Pemantauan JPPR Aji Pangestu mengatakan JPPR dan KIPP mendorong semua pihak untuk kritis melakukan eksaminasi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dianggap memiliki penyelundupan hukum, bahkan membuat bingung salah satu hakim konstitusi. "Kami mendorong semua pihak melakukan evaluasi terhadap Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaannya secara independen, profesional dan berkeadilan," kata Aji Pangestu, Senin (23/10).

Aji Pangestu mengatakan JPPR dan KIPP juga mendesak Mahkamah Konstitusi untuk membentuk Majelis Kehormatan Mahka-

mah Konstitusi (MKMK) secara permanen untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik berupa conflict of interest terhadap Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi selaku Hakim Konstitusi. Hal itu, selain karena MK merupakan amanah yang tertuang dalam Pasal 27A ayat (2) UU MK, pembentukan MKMK secara permanen juga menjadi salah satu rekomendasi dalam Putusan MKMK Nomor 01/MKMK/T/02/2023 yang penting untuk direalisasikan.

Dikemukakan, KIPP dan JPPR juga mendorong adanya rekonstruksi Mahkamah Konstitusi yang didesain secara ketat dengan upaya menjaga kemandirian hakim konstitusi baik secara personal maupun kelembagaan. Termasuk melarang adanya hubungan keluarga antara Presiden selaku pejabat eksekutif dan pimpinan DPR selaku pejabat legislatif dengan hakim konstitusi selaku orang yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indo-



KR-Istimewa

Aji Pangestu

nesia.

Sekjen KIPP Indonesia Kaka Suminta mengatakan pada hari Senin, 16 Oktober 2023 Mahkamah Konstitusi membacakan beberapa putusan dengan isu yang sama yakni terkait dengan uji materi (judicial review) usia calon presiden dan calon wakil presiden. Dari beberapa putusan tersebut, kata dia, terdapat putusan yang dianggap inkonsisten dengan putusan lainnya sehingga membuat bingung salah

satu majelis Hakim Konstitusi. Ini mendapat reaksi publik yang sangat negatif, sangat bermuansa politis, dan diduga adanya intervensi kekuasaan demi kepentingan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024, yakni terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Amar putusan itu, kata dia, 'menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun' bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah".

(Osy)-f